

KEBUTUHAN KONSULTAN KEUANGAN DAN PERPAJAKAN BAGI UKM DI KOTA SEMARANG

Ulfah Hidayati

Politeknik Negeri Semarang, Jurusan Akuntansi Jl. Prof. Soedarto SH Tembalang
ulfah_polines@yahoo.co.id

Abstract

The bookkeeping discipline has not been entrenched especially for the scale of small and medium enterprise. Generally, the small and medium enterprise has not been keeping record of transactions. Usually, they just make a note about the number of the sales and the purchases. By this condition, it is very difficult to investigate how much the total of net income. This study aims to determine the necessary of consultation on issues of financial reporting and taxation toward the small and medium enterprise in the Tembalang and Banyumanik district.

The study is conducted by distributing the questionnaires to the small and medium enterprises in the Tembalang and Banyumanik region. The 5 from 75 questionnaires are distributed experiencing the problems. The questionnaires could not be processed because the stuffing incomplete.

The result of this study conclude that the majority of respondents are as 70% in this study wanting to have accounting or bookkeeping system, but another respondents are as 20% or 18 respondents state requiring the services of a professional consultant.

Keywords: UKM, consultant, bookkeeping / accounting

Disiplin melakukan pembukuan belum membudaya di Indonesia terutama untuk Usaha skala kecil dan menengah. Usaha Kecil Menengah (UKM), umumnya masih banyak yang belum melakukan pencatatan atas transaksi yang dilakukan. Yang biasanya dicatat hanya menyangkut jumlah penjualan dan pembelian. Dengan kondisi ini, sulit diketahui dengan pasti besarnya penghasilan neto dan perkembangan usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan akan konsultasi mengenai masalah pelaporan keuangan dan perpajakan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) di wilayah Kecamatan Tembalang dan Banyumanik.

Penelitian dilakukan dengan jalan menyebarkan kuesioner kepada sejumlah UKM yang ada di daerah Tembalang dan Banyumanik. Dari 75 kuesioner yang didarkan, sebanyak 5 kuesioner tidak bisa diolah karena isian yang tidak lengkap.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini (70%) menginginkan memiliki sistem pembukuan/akuntansi, tetapi hanya 20 persen (18 responden) yang menyatakan membutuhkan jasa konsultan yang profesional.

Kata Kunci : UKM, konsultan, pembukuan/akuntansi

PENDAHULUAN

Laporan keuangan suatu badan usaha sangatlah penting, karena dari laporan keuangan lah suatu badan usaha dapat berkaca pada dirinya, apakah usaha yang dijaclankan memiliki kinerja yang baik atau tidak. Selain untuk mengetahui kinerja usahanya, laporan keuangan juga dapat digunakan sebagai alat untuk evaluasi dan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Tapi, bagi badan usaha yang masih dalam skala kecil, atau biasa kita sebut UKM, terwujudnya laporan keuangan bagi usahanya seolah-olah hanyalah sebuah angan-angan.

Banyak faktor yang menyebabkan suatu UKM tidak menyusun laporan keuangan, diantaranya yang paling banyak disampaikan adalah karena tidak memiliki sumberdaya yang memadai untuk hal tersebut, baik itu dari sisi finansial maupun non finansial. Penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2010) menyimpulkan bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi keengganan dalam menyusun laporan keuangan pada UKM di Kabupaten Malang antara lain adalah faktor pendidikan dan keterampilan akuntansi. Husni (2009) yang meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi usaha kecil menengah dalam penyusunan laporan keuangan menyimpulkan antara lain faktor pengalaman petugas pembukuan.

Kesulitan dalam melakukan pembukuan/akuntansi seringkali dihadapi oleh usaha perseorangan yang asih dalam skala kecil dan menengah tersebut. Kesulitan itu menyangkut aktivitas dan penilaian atas hasil yang dicapai oleh setiap usaha. Apalagi kalau harus dilakukan pengukuran dan penilaian atas aktivitas yang terjadi dalam kegiatan usaha. Pencatatan seringkali

dilakukan hanya dengan melihat berapa uang yang masuk diselisihkan dengan uang yang keluar, tanpa melihat pengeluaran uang itu untuk apa. Seringkali dalam skala usaha kecil menengah hasil usaha dikatakan bagus jika pendapatan sekarang lebih tinggi dibanding dengan pendapatan sebelumnya. Padahal indikator dari keberhasilan tidak hanya diukur dari pendapatan saja. Perlu pengukuran atas transaksi / kegiatan yang terjadi, perlu pengelompokan serta perlu pengihtisaran transaksi-transaksi tersebut.

UKM yang ada sekarang masih banyak yang melakukan aktivitas usaha yang tidak memisahkan aktivitas sehari-hari (rumahan) misalkan biaya listrik, air, dan biaya yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi, tetapi ikut serta dalam mendukung pelaksanaan proses produksi tersebut. Biaya-biaya tersebut sering kali tidak dipisahkan mana yang merupakan pengeluaran usaha mana yang merupakan pengeluaran rumah tangga. Hal ini sering terjadi pada industri rumah tangga.

Disamping hal di atas seringkali faktor tenaga kerja tidak ikut diperhitungkan dalam menetapkan harga dari sebuah hasil produksi. Asal ada lebihnya dari biaya produksi langsung para pengusaha kecil sudah merasa senang. Padahal kalau dihitung kembali mungkin saja harga jual yang ditetapkan tersebut tidak bisa menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat suatu produk.

Kalau hal itu dibiarkan oleh para pengusaha terutama pengusaha kecil dan menengah, tidak menutup kemungkinan dalam jangka panjang perusahaan tidak bisa mengembangkan usahanya akibat dari tidak dilakukan pengukuran atau penilaian dari setiap aktivitas usaha. Agar bisa melakukan pengakuan,

penilaian, pengukuran, setiap pengusaha perlu menciptakan sebuah sistem pencatatan yang baik dari setiap aktivitas usaha tersebut. Dengan sistem pencatatan yang baik nantinya akan dihasilkan pelaporan hasil usaha dan kondisi perusahaan yang benar. Hal ini bisa dilakukan jika unit usaha melakukan sistem akuntansi yang disesuaikan dengan jenis usahanya. Jika perusahaan belum mampu untuk menciptakan sistem akuntansi yang baik, minimal unit usaha (kecil dan menengah) melakukan sistem pembukuan yang baik.

Ada sedikit kekaburan antara pembukuan dengan akuntansi. Hal ini sebagian disebabkan oleh kenyataan bahwa keduanya saling berhubungan dan tidak ada pemisahan yang tegas dan diterima secara umum. Pada umumnya pembukuan adalah pencatatan data unit usaha dengan suatu cara tertentu. Seorang pemegang buku mungkin bertanggungjawab atas semua pencatatan dalam perusahaan atau hanya sebagian kecil saja dari kegiatan pencatatan dalam perusahaan tersebut (misalnya mencatat keluar masuknya barang dalam kartu stok). Sebagian besar pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang buku bersifat teknis pelaksanaan.

Akuntansi lebih menekankan kegiatan terhadap perancangan sistem pencatatan, penyusunan laporan berdasarkan data yang telah dicatat dan penafsiran atas laporan-laporan tersebut. Dengan demikian pembukuan merupakan salah satu bagian dari aktivitas akuntansi padahal setiap aktivitas dalam perusahaan harus bisa dicatat dan dilaporkan dalam suatu sistem yang terintegrasi (terpadu) antara kegiatan satu dengan kegiatan lainnya.

Menurut Soemarso (1990), "Akuntansi merupakan proses pencatatan,

pengidentifikasian, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut". Setiap pengusaha dalam mengambil suatu keputusan pasti memerlukan sebuah informasi yang benar sebagai dasar pengambilan keputusannya, Informasi akuntansi inilah yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan terutama dalam aspek keuangan.

Dari pengertian akuntansi di atas dapat diketahui bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. (bagian ini menjelaskan tentang kegiatan akuntansi). Informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai usaha yang bersangkutan (merupakan segi kegunaan akuntansi).

Informasi yang dimaksudkan di atas adalah informasi keuangan atau lebih jelasnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan suatu perusahaan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2000) dalam Standar Akuntansi Keuangan adalah neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan Keuangan memungkinkan seorang pebisnis/wirausahawan melihat apa yang tidak terlihat oleh investor biasa. Itu bisa memberi seorang pebisnis/wirausahawan control atas keuangan pribadi seorang pebisnis/wirausahawan, dan memungkinkan seorang pebisnis/wirausahawan pergi kemanapun seorang pebisnis/wirausahawaningin pergi dalam hidupnya. Memegang control atas Laporan-laporan Keuangan juga memungkinkan seorang pebisnis/wirausahawan mengelola

aneka bisnis tanpa secara fisik hadir dalam bisnis itu.

Pemerintah saat ini menggencarkan perolehan pajak dari semua lini. Pajak dari usaha kecil dan menengah pun diintensifkan. Sanksi pajak yang cukup besar telah menggugah banyak pengusaha UKM (Usaha Kecil dan Menengah) akan pentingnya pencatatan transaksi keuangan menurut standar pajak dan membuat laporan penyetoran pajak yang tepat, demi kelancaran usaha dan mencegah sanksi usaha dari pemerintah.

Bagi UKM, merekrut seorang karyawan yang mengerti pajak mungkin terlalu mahal untuk bisnis berukuran UKM. Sementara itu jika dilakukan pelatihan pajak bagi karyawan yang sudah ada, mungkin menyebabkan kemacetan proses bisnis yang berlangsung. Oleh karena itu akan lebih mudah dan murah bagi UKM untuk memanfaatkan jasa konsultan pajak untuk membantu memecahkan masalah perpajakan yang dihadapinya.

Berdasarkan survey kebutuhan pasar tentang jasa pengembangan usaha (*Business Development Service=BDS*) komersial untuk usaha kecil dan menengah di Jawa Tengah yang dilakukan oleh Bapenas-GTZ *SME Promotion Project* pada tahun 2002, 60% UKM yang menjadi responden menyatakan untuk masalah akuntansi, perpajakan atau persoalan hukum, mereka meminta bantuan kepada konsultan luar, sedangkan 40% responden menyatakan masih memecahkan sendiri berbagai persoalan yang menyangkut ke tiga bidang di atas.

Usaha Kecil dan Menengah, disingkat UKM merupakan istilah yang mengacu pada jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut : 1). Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2). Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). 3). Milik Warga Negara Indonesia. 4). Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar. 5). Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Salah satu kekurangan utama UKM adalah sistem informasi akuntansi yang kurang memadai. Inilah yang menjadi akar masalah kesulitan UKM mengakses pinjaman perbankan, yaitu ketidaksesuaian laporan keuangan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Perubahan PSAK yang akan mengadopsi penuh Standar Akuntansi Keuangan Internasional (IFRS) di tahun 2012, tentunya akan semakin menyulitkan UKM menstandarkan laporan keuangannya, karena PSAK tersebut lebih kompleks dan ditujukan bagi perusahaan yang akan listing dipasar modal.

Agar sistem berjalan lebih mudah bagi UKM, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) membuat standar yang lebih sederhana dengan menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan (untuk

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). SAK-ETAP dapat digunakan oleh 51.261.909 UKM di Indonesia (yang tidak terdaftar di pasar modal) untuk membuat laporan keuangan, yang akan berguna untuk pihak eksternal, seperti kreditor atau investor. SAK-ETAP juga merupakan solusi permasalahan internal perusahaan, terutama bagi manajemen yang cepat puas dengan kondisi yang ada tanpa melihat kondisi keuangan yang sebenarnya.

Politeknik Negeri Semarang, khususnya Jurusan Akuntansi, memiliki potensi yang besar untuk turut menyediakan jasa konsultasi keuangan dan perpajakan bagi UKM tersebut. Oleh karena itu penelitian ini akan mengidentifikasi kebutuhan UKM akan konsultasi masalah keuangan dan perpajakan.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Kota Semarang, saat ini terdapat hampir 278 UKM di kota Semarang, jika Polines bisa menjalin kerjasama dalam bidang konsultasi keuangan dan perpajakan dengan UKM-UKM tersebut, maka terjadi simbiosis mutualisme yang akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat saja permasalahan akuntansi dan perpajakan yang dihadapi UKM di Kota Semarang dan seberapa besar kebutuhan UKM-UKM di kota Semarang terhadap konsultasi keuangan dan perpajakan.

METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data diambil dengan menyebarkan kuesioner kepada UKM di lingkungan kampus Politeknik Negeri Semarang yaitu di wilayah Tembalang dan Banyumanik. Populasi penelitian ini adalah Usaha Kecil Menengah di Kota Semarang. Sampel penelitian adalah UKM yang

berada di sekitar kampus Politeknik Negeri Semarang, yaitu yang berlokasi di daerah Tembalang dan Banyumanik Politeknik Negeri Semarang. Penelitian akan mensurvei 75 UKM, yang terdiri dari 38 UKM yang berada di Banyumanik dan Tembalang yang terdaftar di Disperindag Kota Semarang dan 37 UKM lain yang tidak terdaftar.

Pertanyaan dalam kuesioner yang diedarkan dibagi dalam tiga aspek. Aspek pertama adalah untuk hal-hal yang sudah dimiliki atau dilakukan oleh perusahaan. Aspek ini berisi 15 pertanyaan. Aspek kedua mengenai permasalahan yang dihadapi perusahaan. Aspek ini berisi empat pertanyaan. Aspek ke tiga berupa hal-hal yang diharapkan perusahaan. Aspek ini terdiri dari empat pertanyaan. Seluruh pertanyaan dalam kuesioner ini diberikan dua alternatif jawaban, yaitu jawaban YA dan jawaban TIDAK

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebaran kuesioner yang menjadi sumber data penelitian ini dilakukan secara langsung kepada UKM di lingkungan Tembalang dan Banyumanik. Dari 75 kuesioner yang diedarkan, sebanyak 5 kuesioner tidak ikut diolah karena isian yang tidak lengkap.

Berdasar tabel 4.1 mengenai demografi responden, sebanyak 19 (27 %) dari responden bergerak di bidang jasa. Usaha jasa ini antara lain meliputi jasa foto copy, salon, servis motor dan mobil, rental komputer, cetak foto dsb. Mayoritas responden yaitu 51 responden (73 %) berusaha di bidang perdagangan. Dalam penelitian ini jika usaha responden adalah jasa dan dagang maka dikategorikan di bidang perdagangan. Perdagangan yang dilakukan bervariasi, antara lain

sembako, makanan, komputer, pulsa handphone dsb

Berdasar omzet yang diperoleh setiap hari, dibedakan menjadi tiga. Pemisahan menjadi tiga kategori ini didasarkan pendefinisian usaha menurut Informasi kebijakan Perpajakan bagi Koperasi Dan UKM dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia (2009).

Menurut informasi kebijakan tersebut, perusahaan yang memiliki omzet per tahun paling banyak Rp. 300.000.000 maka dikategorikan sebagai usaha mikro. Dengan asumsi enam hari kerja dalam satu minggu, maka diperoleh angka pembulatan omzet per hari Rp. 1.500.000. Perusahaan dengan omzet Rp. 300.000.000 sampai dengan Rp. 2.500.000.000 per tahun dikategorikan sebagai usaha kecil. Jika dengan asumsi yang sama dengan diatas maka diperoleh angka pembulatan Rp. 8.500.000 per hari.

Tabel 4.1
Demografi Responden

KETERANGAN	JUMLAH	PROSENTASE
BIDANG USAHA		
1. JASA	19	27%
2. DAGANG	51	73%
TOTAL	70	100%
OMZET PER HARI		
1. KURANG DARI Rp. 1.500.000	30	43%
2. Rp. 1.500.000 - Rp. 8.500.000	38	54%
3. LEBIH DARI Rp. 8.500.000	2	3%
TOTAL	70	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2010

Hanya dua dari 70 (3 %) responden yang menyatakan omzet per harinya lebih dari Rp. 8.500.000 atau dapat dikelompokkan sebagai usaha menengah. Mayoritas responden (38 responden atau 54 %) menyatakan omzet per harinya pada kisaran Rp. 1.500.000 – Rp 8.500.000. atau sebagai usaha kecil. Sedangkan 30 responden lain (43 %) menyatakan kalau omzet per harinya kurang dari Rp. 1.500.000.

Hasil isian mengenai omzet ini barangkali tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Karena di lapangan banyak responden yang mengakui omzet yang lebih kecil karena adanya kekhawatiran mengenai masalah pajak

Aspek yang Sudah Dimiliki Perusahaan

Pada pertanyaan pertama yang menanyakan apakah setiap penjualan menggunakan nota, 59 responden (79%) menyatakan bahwa setiap penjualan yang mereka lakukan menggunakan nota. 55 responden (77 %) juga menyatakan bahwa setiap pengeluaran kas mereka menggunakan bukti pengeluaran kas.

57 (81 %) responden menyatakan bahwa mereka merekap penjualan yang terjadi setiap hari dan 59 responden menyatakan mencatat penjualan setiap harinya. 61 responden juga menyatakan bahwa mereka melakukan pencatatan terhadap pembelian yang mereka lakukan. Tetapi pencatatn tersebut Belem tentu

disertai bukti-bukti untuk mendukung pencatatan, karena hanya 47 responden (67 %) yang menyatakan bahwa setiap pencatatan transaksi disertai bukti-bukti pendukung.

Dari 70 perusahaan yang menjadi responden, 49 diantaranya (70%) menyatakan kalau mereka memiliki pembukuan, tetapi hanya 35 responden yang menyatakan kalau mereka

memiliki karyawan yang menangani masalah pembukuan/akuntansi. Dari 49 responden yang menyatakan memiliki pembukuan, hanya 35 responden (50%) yang menyusun laporan laba rugi secara berkala. Sedangkan untuk laporan lainnya seperti neraca dan laporan perubahan modal, hanya 16 perusahaan (23%) yang menyatakan membuatnya.

Tabel 4.2
ASPEK YANG SUDAH DIMILIKI PERUSAHAAN

KETERANGAN	JUMLAH	PROSENTASE
Apakah setiap penjualan menggunakan nota?	54	79%
Apakah setiap pengeluaran kas menggunakan nota?	55	77%
Apakah dilakukan rekapitulasi penjualan setiap hari?	57	81%
Apakah perusahaan anda memiliki catatan penjualan?	62	89%
Apakah pencatatan penjualan dilakukan setiap hari ?	59	84%
Apakah setiap pembelian dicatat?	61	87%
Apakah pembayaran biaya-biaya seperti biaya gaji, listrik, air, telepon dll. dicatat ?	54	77%
Apakah dalam setiap kali pencatatan transaksi harus disertai bukti-bukti yang mendukung?	47	67%
Apakah perusahaan memiliki pembukuan ?	49	70%
Apakah perusahaan memiliki karyawan yang bertugas melakukan pembukuan?	35	50%
Apakah perusahaan menyusun laporan laba rugi secara berkala?	31	44%
Selain laporan laba rugi, apakah perusahaan menyusun neraca dan laporan perubahan modal	16	23%
Apakah perusahaan menggunakan piranti komputer untuk melakukan pembukuan	30	43%
Apakah perusahaan menghitung pajak ?	39	56%
Apakah perusahaan menghitung sendiri pajak yang harus disetor?	26	37%

Sumber : Data primer yang diolah,2010

Sebanyak 30 responden menyatakan menggunakan komputer sebagai alat bantu pembukuan/akuntansinya. 39 responden menyatakan mereka menghitung pajak yang harus dibayar dan 26 responden diantaranya menyatakan menghitung sendiri pajak harus dibayar.

Aspek Permasalahan Yang Dihadapi Perusahaan

Sebanyak 70 perusahaan yang menjadi responden atau hanya 22 (31%) responden yang menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui cara-cara pembukuan. Jika kita bandingkan

dengan pertanyaan ke 10 yang menghasilkan angka 49 (70%) responden yang mengaku memiliki pembukuan, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa 30% responden yang tidak memiliki pembukuan tersebut karena memang tidak mengetahui cara-cara pembukuan.

Tabel 4.3
PERMASALAH YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

KETERANGAN	JUMLAH	PROSENTASE
PERMASALAH YANG DIHADAPI		
Tidak mengetahui cara-cara pembukuan	22	31%
Tidak memiliki pembukuan	18	26%
Tidak memiliki karyawan yang dapat melakukan pembukuan	26	37%
Tidak memiliki biaya untuk melakukan pembukuan	20	29%

Sumber : Data primer yang diolah, 2010

Permasalahan lain yang dihadapi perusahaan adalah karena tidak memiliki karyawan yang bertugas di bagian pembukuan/akuntansi yaitu 26 perusahaan (37%). Sedangkan perusahaan yang merasa tidak memiliki biaya untuk melakukan pembukuan hanya 20 responden (29%).

Sebanyak 50 responden menyatakan mereka mengharapkan perusahaan mereka memiliki pembukuan (akuntansi). Jumlah ini jika dibandingkan dengan hasil jawaban dari pertanyaan ke 10, bahwa 49 perusahaan menyatakan sudah memiliki pembukuan, maka barangkali pembukuan yang mereka miliki belum sepenuhnya memenuhi apa yang mereka harapkan.

Aspek Yang Dibutuhkan Perusahaan

Tabel 4.4
ASPEK YANG DIBUTUHKAN PERUSAHAAN

KETERANGAN	JUMLAH	PROSENTASE
YANG DIBUTUHKAN PERUSAHAAN		
Apakah anda berkeinginan perusahaan anda memiliki pembukuan (akuntansi)?	50	71%
Apakah anda ingin perusahaan anda memiliki pembukuan secara komputerisasi?	46	66%
Apakah anda menginginkan jasa konsultan untuk membantu menyusun sistem pembukuan (akuntansi) perusahaan anda?	18	26%
Apakah perusahaan membutuhkan jasa konsultan perpajakan?	22	31%

Sumber : Data primer yang diolah, 2010

Dari 50 perusahaan yang menginginkan memiliki pembukuan/akuntansi, 46 diantaranya menginginkan pembukuan secara komputerisasi. Kalau dilihat dari jumlah tersebut, sebenarnya mengindikasikan keinginan yang besar dari perusahaan-perusahaan tersebut untuk memiliki sistem pembukuan/akuntansi yang memadai, tetapi dari jumlah tersebut hanya 18 perusahaan yang menyatakan mereka membutuhkan jasa konsultan untuk membantu menyusun sistem pembukuan/akuntansi mereka. Sedangkan untuk masalah perpajakan, 22 perusahaan menyatakan mereka membutuhkan jasa konsultan pajak.

Berdasar hasil tabulasi kuesioner, diperoleh hasil bahwa mayoritas perusahaan sebenarnya menginginkan memiliki sistem pembukuan/akuntansi untuk mendukung usaha mereka. Kendalanya sebenarnya lebih pada ketidakmauan perusahaan untuk melakukan konsultasi dalam rangka mewujudkan keinginan tersebut. Dari 50 perusahaan yang menginginkan memiliki sistem pembukuan hanya 18 yang menginginkan konsultasi dengan ahli, padahal dari total responden yang berjumlah 70 usaha, hanya 20 responden yang mengaku mengalami kendala pembiayaan untuk mengadakan system pembukuan tersebut.

Survey yang dilakukan oleh Bappenas – GTZ SME Promotion Project mengenai kendala-kendala dan kebutuhan BDS (*Business Development Service*) di kabupaten-kabupaten terpilih di Jawa Tengah pada tahun 2002 memberikan hasil yang hampir sama. Menurut survey tersebut, 63% responden menyatakan bisa menangani sendiri masalah-masalah yang berkaitan dengan perencanaan usaha, masalah teknis, perencanaan produksi, komunikasi, transportasi, pemasaran, keuangan dan manajemen.

Tetapi jika menyangkut masalah akuntansi, perpajakan atau persoalan hukum, 60 % responden menyatakan meminta bantuan kepada pihak luar. Tetapi pihak luar disini bukan berarti kepada konsultan, karena 14 % responden mengaku meminta bantuan kepada keluarga dan 11 % meminta bantuan kepada teman.

Kebutuhan akan konsultan menurut survey ini lebih besar dibanding dengan hasil penelitian ini. Hal ini karena perbedaan karakteristik responden. Perusahaan yang menjadi responden dalam survey tersebut dikelompokkan menjadi usaha kecil dengan criteria memiliki jumlah karyawan 5 – 19 orang dan usaha menengah dengan criteria memiliki 20 – 99 orang karyawan.

SIMPULAN

Setiap bidang usaha pada dasarnya membutuhkan suatu sistem pembukuan/akuntansi untuk menunjang usahanya. Kebutuhan tersebut bisa dimintakan bantuan dari konsultan yang profesional. Hasil penelitian ini memperlihatkan, dari 70 usaha yang menjadi responden, 50 diantaranya menginginkan memiliki pembukuan, 46 diantaranya menginginkan pembukuan secara komputerisasi. Meskipun hanya 18 responden yang menginginkan menggunakan jasa konsultan untuk masalah akuntansinya, paling tidak hal ini bisa menjadi pangsa pasar awal jika Jurusan Akuntansi membuka biro jasa konsultan. Kerjasama yang telah dilakukan dengan Zahir Accounting barangkali bisa ditindaklanjuti dengan memprospek 18 perusahaan yang menginginkan jasa konsultasi tersebut.

Daftar Pustaka

Bappenas-GTZ SME Promotion Project. 2002. "Survey Pasar Mengenai Kendala-Kendala dan

- Kebutuhan akan DBS di Kabupaten-Kabupaten Terpilih di Jawa Tengah". GFA Management
- Ghozali, Imam., 2008, *Statistik Deskriptif*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Harnanto (2008), *Akuntansi Perpajakan*, BPFE Yogyakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan (SAK)*.
- Mutmainah, Siti. 2010. *Analisis Kebutuhan Konsultan Keuangan dan Perpajakan Bagi UKM di Kota Semarang*. Polines. Penelitian tidak dipublikasikan
- Putra, Hermon Adhy. 2012. *Penyusunan Laporan Keuangan bagi Usaha Kecil Menengah Berdasar SAK-ETAP*. Proceeding Call for Paper. UKSW
- Soemarso. 1990. *Akuntansi Pengantar*. Salemba Empat, Jakarta
- Wahyudi, Mohamad. 2009. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) di Yogyakarta*. Tesis. Universitas Diponegoro
- Warsono, Sony dan Irene Natalia. 2011. *Akuntansi Pengantar 1*. AB Publisier. Yogyakarta